



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN -PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Made in China 2025: Strategi Tiongkok untuk Menghadapi
Revolusi Industri 4.0

Skripsi

Oleh
Widyanto
2015330004

Bandung
2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN -PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Made in China 2025: Strategi Tiongkok untuk Menghadapi
Revolusi Industri 4.0

Skripsi

Oleh

Widyanto

2015330004

Pembimbing

Dr. Adelbertus Irawan J. Hartono

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

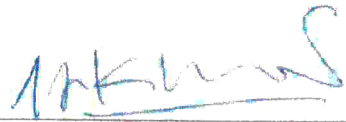


Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Widyanto
Nomor Pokok : 2015330004
Judul : Made in China 2025 : Strategi Tiongkok untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 3 Juli 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Dr. Aknolt Kristian Pakpahan

: 

Sekretaris
Dr. Adelbertus Irawan J. Hartono

: 

Anggota
Albert Tribowo, S.IP, MA

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Widyanto

NPM : 2015330004

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : *Made in China 2025: Strategi Tiongkok untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Mei 2019

Widyanto

Abstrak

Nama : Widyanto
NPM : 2015330004
Judul : *Made in China 2025: Strategi Tiongkok untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0*

Pada tahun 2015, Tiongkok mengumumkan strategi industri yang ambisius yaitu strategi “*Made in China 2025*,” melalui strategi ini Tiongkok berharap untuk memajukan sektor industrinya dengan memasuki Revolusi Industri ke-4 atau Revolusi Industri 4.0, dan menjadi salah satu negara industri manufaktur kuat di dunia. Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan implementasi *Made in China 2025* terutama pada bidang produksi berserta teknologi-teknologi Revolusi Industri ke-4 yang dimanfaatkan, dan memberikan gambaran umum mengenai pertumbuhan industri Tiongkok serta karakteristiknya dari tahun 2006 hingga dengan Januari 2019. Penulis berhasil menemukan bahwa implementasi *Made in China 2025* dijalankan di bawah dorongan kuat dari Tiongkok melalui perencanaan yang jeli dari Tiongkok dalam melakukan pengalokasian sumber daya baik itu modal maupun manusia. Dengan terpenuhinya kebutuhan modal, ketenagakerjaan, sebuah industri baru bisa berkembang semakin depan dan menjadi semakin kuat, dan dukungan dari negara membuat perusahaan seperti ZPMC, COMAC, Winsun, Baidu, Alibaba, Tencent, Jd, dsb. menjadi percaya diri untuk terus berlangkah kedepan dan bersaing dalam pasar internasional.

Kata Kunci: Intervensi, Pajak, Tenaga Kerja, Pertumbuhan Industri, dan Perkembangan Industri.

Abstract

Name : Widyanto

NPM : 2015330004

Title : Made in China 2025: China's Strategy to Face Industrial Revolution 4.0.

On 2015, China announced an ambitious strategy the "Made in China 2025" China's plans and strategy to boost the growth of their industries, by entering the Fourth Industrial Revolution or the Industrial Revolution 4.0 and becoming one of the strongest manufacturing state in the world. In this research, the writer will explain the implementation of Made in China 2025 especially in the field of production along with the Fourth Industrial Revolution technologies it utilized, also describes the growth of China's industry and its characteristic from the year of 2006 till January 2019. Writer has found that the implementation of Made in China 2025 is executed with strong encouragement from China through an observant planning in allocating both capital and human resources. To grow and become stronger, industries must first acquire an adequate amount of funding and high quality labors, luckily China are willing to go all out and properly mobilize all resources on hand to ensure industries in China are able to obtain proper and adequate amount of labor forces and funding, with the backing from the states enterprises such as the ZPMC, COMAC, Winsun, Baidu, Alibaba, Tencent, Jd, etc. are able to continue marching forward confidently and enter the global market facing fierce competition from the international brands.

Keywords: Intervention, Taxes, Labor, Industrial Growth, and Industrial Development.

Kata Pengantar

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya bisa menyelesaikan skripsi ini, dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Falkutas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Katholik Parahyangan. Penelitian ini menjelaskan mengenai strategi kebijakan industri Tiongkok dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, dengan melalui pendekatan teori Neo-Merkantilisme dan mendalami tentang strategi ekonomi, strategi industrialisasi dan sikap proteksionisme. Terdapat tiga hal yang menjadi fokus utama penulis dalam penelitian ini antara lain perkembangan kebijakan industri Tiongkok terutama pada dekade terakhir, hubungan antara *Made in China 2025* dan Revolusi Industri 4.0, dan implementasi *Made in China 2025*. Tidak hanya sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar akademik, penulisan penelitian ini dilandasi oleh keinginan penulis untuk menjelaskan pengaruh sikap dan kebijakan intervensionis Tiongkok dalam mengimplementasikan strategi *Made in China 2025*. Sehingga pembaca mendapatkan gambaran kekuatan industri Tiongkok kontemporer, serta pengetahuan terhadap kebijakan “*Made in China 2025*” Tiongkok sebagai upaya menghadapi Revolusi Industri 4.0 serta langkah Tiongkok menjadi kekuatan super manufaktur.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman, sahabat, dan keluarga yang selalu mendukung penulis dan menemani penulis dalam menyelesaikan perjalanan untuk menempuh gelar akademik di Universitas Katholik Parahyangan. Dan penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dr. Adelbertus Irawan J. Hartono selaku dosen pembimbing yang telah membantu memperbaiki kekurangan-kekurangan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, atas bantuan dan saran dari beliau penulis kemampuan penulis dalam melakukan analisa penelitian mengalami perkembangan luar biasa. Dan Penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca juga.

Bandung, Mei 2019

Widyanto

Daftar isi

Abstrak	I
Abstract.....	II
Daftar isi	IV
Daftar Tabel.....	VI
Daftar Gambar.....	VII
Daftar Singkatan.....	VIII
Bab I-Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.2.1. Pembatasan Masalah.....	5
1.2.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Kegunaan Penelitian	6
1.4. Kajian Literatur.....	6
1.5. Kerangka Pemikiran.	8
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	23
1.6.1. Metode Penelitian	23
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.....	23
1.7. Sistematika Pembahasan.....	23
Bab II-Kebijakan Industri Tiongkok 2006-2015: Strategi Perkembangan Teknologi dan Sains Berbasis Inovasi	25
2.1. Perkembangan Kebijakan Industri Tiongkok (1949-2015).....	26
2.1.1. Karakteristik Perkembangan Kebijakan Industri Tiongkok (1978-2015)	30
2.1.2. Peran FDI dalam Perkembangan Ekonomi Tiongkok (1978-2015).....	33
2.2. Perencanaan Lima Tahun Ke-11 dan 12 yang Berbasis Inovasi Teknologi dan Sains. 39	
2.2.1. Perencanaan Lima Tahun Ke-11 (2006 s.d. 2010)	40
BAB III-Made in China 2025: Strategi Industri Tiongkok Menghadapi Revolusi Industri 4.0.....	51
3.1. Revolusi Industri ke-4	52
3.2. Tantangan dan Kesempatan bagi Pencapaian <i>Made in China 2025</i>	54
3.3. <i>Made in China 2025</i> : Strategi Industri China Menghadapi Revolusi Industri ke-4	58
3.3.1. Tujuan Tiongkok dalam <i>Made in China 2025</i>	59

3.3.2. Beberapa Bagian Penting dalam <i>Made in China 2025</i>	68
BAB IV-Implementasi <i>Made in China 2025</i>.....	73
4.1. Kebijakan-kebijakan Tiongkok dalam Mendukung Perkembangan Industri Manufaktur (2015 s.d. 2019).....	75
4.2. Kondisi Foreign Direct Investment di Tiongkok Setelah 2015.....	80
4.3. Implementasi <i>Made in China 2025</i> Industri Tiongkok Bidang Produksi	83
4.3.1. Pembangunan Smart-port ZPMC.	86
4.3.2. Pemanfaatan 3D <i>Printing</i> di Tiongkok.....	90
4.3.3. Pengembangan Teknologi AI	93
4.4. Implikasi <i>Made in China 2025</i> Terhadap Sektor Ketenagaan Kerja Tiongkok	95
4.4.1. Robot Industri dan Tenaga Kerja Tiongkok	96
4.4.2. Potensi Krisis Tenaga Kerja Tiongkok.....	100
BAB V-Kesimpulan.....	105
Daftar Pustaka	109

Daftar Tabel

Tabel 1 Sepuluh Sumber FDI Terbesar Tiongkok.....	36
Tabel 2 Sembilan Langkah Utama Tiongkok Dalam <i>Made in China</i> 2025.....	61
Tabel 3 Perbandingan Kepemilikan Perusahaan Manufaktur IC Tahun 2000 & 2016.	81
Tabel 4 Perbandingan Pertumbuhan dan Pengurangan Lapangan Kerja akibat Otomatisasi tahun 2017	99

Daftar Gambar

Gambar 1 Tahap Terakhir Pembangunan Otomatisasi Pelabuhan Yangsan.....87
Gambar 2 Jembatan Semen 3D Printed di Tiongkok.....92

Daftar Singkatan

AI	<i>Artificial Intelligent</i>
AIMIS	<i>Artificial Imtelligent Medical Innovation System</i>
ARTG	<i>Automated Rubber Tyred Gantry</i>
BAT	Baidu, Ailbaba, Tencent
COMAC	<i>Commercial Aircraft Corporation of China</i>
FDI	<i>Foreign Direct Investment</i>
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trades</i>
IC	<i>Integrated Circuit</i>
IOE	Industrialisasi ber-Orientasi Ekspor
IOT	<i>Internet of Things</i>
IPE	<i>International Political and Economy</i>
ISI	Industrialisasi Substitusi Impor
NIC	<i>Newly Industrialized Country</i>
POE	<i>Private Owned Enterprise</i>
PPN	Pajak Pertumbuhan Nilai
R&D	<i>Research and Development</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
SEC	<i>Special Economic Zone</i>
SEI	<i>Strategic Emerging Industry</i>
SOE	<i>State Owned Enterprise</i>
WFOE	<i>Wholly Foreign Owned Enterprise</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>
ZPMC	<i>Zhenhua Port Machinery Company</i>

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah, revolusi industri merupakan sebuah fenomena yang memiliki kekuatan untuk mendorong kondisi ekonomi suatu negara, contohnya ialah negara Eropa pada pertengahan abad ke-17 hingga abad ke-18 berhasil majukan kondisi ekonomi mereka dengan adanya perubahan pada proses manufaktur mereka. Pada masa kontemporer, revolusi industri 4.0 menjadi bantu loncatan negara-negara industri baru untuk mencapai tahap negara industri maju. Sebuah strategi ekonomi diperlukan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi maupun stabilitas ekonomi dalam menghadapi kondisi ekonomi global ataupun domestik.

Pada tahun 2015, Republik Rakyat Tiongkok mengumumkan strategi untuk mengambil ahli proses manufaktur dunia yaitu “制造中国 (Zhìzào zhōngguó) 2025” diterjemahkan sebagai “*Made in China 2025*” secara harafiah kata “制造 (zhìzào)” yang artinya kegiatan memproduksi dan kata “中国 (zhōngguó)” yang arti Tiongkok, dari arti kedua kata tersebut menandakan adanya keinginan Pemerintahan Xi Jinping ingin membangun Tiongkok versi 2025, dan dari sebutan kebijakan tersebut dalam bahasa inggris yaitu “*Made in China 2025*” memiliki konotasi bahwa hasil manufaktur akan berasal dari Tiongkok atau China maka bisa diartikan bahwa strategi Tiongkok ini merupakan strategi ambisius untuk

membangun diri dan mengambil ahli kegiatan produksi manufaktur.

Proses industrialisasi di Tiongkok bermula pada tahun 1958 di bawah masa pemerintahan Mao Zhedong dengan kebijakan yang dikenal dengan 大跃进 (Dàyuèjìn) atau lompatan besar dengan mengindustrialisasikan sektor agrikultur Tiongkok pada masa itu. Strategi ekonomi Tiongkok pada masa itu menggunakan model Soviet sebagai acuannya, dan melalui kebijakan lompatan besar, Mao Zhedong memodifikasikan sistem pertanian yang semulanya masih bersifat individual menjadi sistem pertanian kolektif atau kelompok, pada awalnya strategi ini berhasil meningkatkan pendapatan negara Tiongkok, namun karena sistem pemerintahan dan birokrasi yang buruk kebijakan mengakibatkan Tiongkok dilanda kelaparan. Proses industrialisasi yang akan mendongkrak ekonomi negara secara menerus, hanya dapat dicapai apabila terdapat *good governance* dalam pemerintahannya yang mampu menyusun strategi ekonomi yang ampuh untuk mendorong kegiatan produksi. Kebijakan Mao sendiri merupakan kebijakan yang disebut irasional karena tidak mempertimbangkan kemampuan dirinya beserta pemerintahannya.

Kondisi ekonomi Tiongkok mengalami kemajuan setelah Deng Xiaoping menjabat posisi Pemimpin Tertinggi Partai melalui sidang partai, menggantikan Hua Guofeng yang sebelumnya ditunjuk sesuai peninggalan Mao Zhedong. Prinsip yang dipegang oleh Deng “Mencari Kebenaran dari Kenyataan” menekankan perlunya menelaah dan mendiskusikan prinsip-prinsip Maoisme dan mengujinya lewat eksperimen-eksperimen terarah dan tercatat, sehingga setiap kekurangan atau

hambatan yang ditemui dapat dievaluasi untuk diperbaiki.¹ Dan Reformasi Ekonomi yang dijalankan pada masa Deng Xiaoping berhasil menjadikan Tiongkok sebagai negara industri baru.

Potensi penggunaan teknologi digital merupakan area yang belum tersentuh penuh potensinya, persiapan negara industri baru seperti Tiongkok untuk menjadi negara maju tentu harus direncanakan secara matang untuk mendapatkan manfaat optimum revolusi industri 4.0,

Tujuan utama dari kebijakan *Made in China 2025* ialah untuk menjadikan Tiongkok sebagai negara manufaktur super.² Kemampuan Tiongkok dalam mengalokasikan sumber daya akan menjadi kunci keberhasilan mereka dalam mengembangkan industri domestik dan menjadi negara manufaktur super dalam era revolusi industri 4.0. Selain itu dalam kebijakan *Made in China 2025* beberapa sektor industri yang menjadi fokus utama, seperti industri Teknologi Informasi, Automobil, Pertanian dan juga pemanfaatan teknologi CNC tercanggih untuk proses manufaktur dan sumber daya alternatif.³

1.2. Identifikasi Masalah

Kebijakan Tiongkok “制造中国 2025” atau “*Made in China 2025*” merupakan strategi ekonomi Tiongkok yang ambisius. Menjadi negara manufaktur

¹ Michael Wicaksono, *Republik Rakyat China: Dari Mao Zedong sampai Xi Jinping* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 405.

² Jost Wübbeke, et.al., “*MADE IN CHINA 2025* The making of a high-tech superpower and consequences for industrial countries,” *MERICCS Paper on China* No.2 (2016), . 6.

³ National Manufacturing Strategy Advisory Committee, *制造中国2025: 重点领域技术路线图*, 2015, Beijing.

super dan menguasai proses produksi manufaktur global adalah tujuan dari kebijakan *Made in China 2025*, Tiongkok pada saat ini menduduki posisi kedua negara ekonomi terkuat setelah Amerika Serikat, sebagai negara industri baru Tiongkok berani menantang Amerika Serikat dan mengumukan diri akan melampaui Amerika Serikat dalam waktu sepuluh tahun dengan memanfaatkan revolusi industri 4.0.

Kebijakan *Made in China 2025* Tiongkok, mengundang kontroversi dari negara-negara lain terutama negara barat seperti Amerika Serikat karena Tiongkok berambisi untuk melepaskan diri dari teknologi-teknologi Barat, dan menjadi sebuah ancaman bagi tatanan ekonomi global dengan berusaha menggantikan posisi Amerika Serikat. Dalam perkembangannya perbedaan kualitas teknologi Tiongkok terhadap teknologi bangsa asing masih tinggi, dan penulis tertarik terhadap kemampuan Tiongkok untuk membangun negara kuat tanpa bantuan dari negara-negara barat yang memiliki teknologi yang lebih maju dan canggih.

Diperlukan modal, sumber daya manusia, serta kemampuan teknologi yang memadai untuk mendorong produksi industri. Melalui strategi *Made in China 2025*, Tiongkok akan berharap untuk mendorong kemampuan produksi industri domestiknya, diperlukan pengerahan sumber daya secara besaran-besaran, dan strategi Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan industri akan menjadi kunci keberhasilan mereka dalam mewujudkan *Made in China 2025*.

Made in China 2025 merupakan bagian dari strategi ekonomi Tiongkok untuk menghadapi revolusi industri 4.0, dan pada umumnya strategi ekonomi mencangkup kemampuan suatu negara dalam mengalokasi atau mobilisasikan

sumber dayanya untuk tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi ataupun mempertahankan stabilitas ekonominya. Tiongkok dalam *Made in China 2025* merancang sebuah strategi ekonomi untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan industrinya. Keahlian Tiongkok dalam mengalokasikan sumber daya diperlukan untuk menjamin keberhasilan *Made in China 2025*, untuk itu penulis akan meneliti tentang implementasi *Made in China 2025* Tiongkok.

1.2.1. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini penulis akan memamparkan perkembangan industri setelah diumumkannya *Made in China 2025*, karakteristik kebijakan industri Tiongkok terutama pada satu dekade terakhir sebelum diumumkannya *Made in China 2025* (2006 s.d 2015), membahas gambaran umum strategi *Made in China 2025* dalam mendorong pertumbuhan industri, dan dampak atau pengaruh dari strategi *Made in China 2025* terhadap perkembangan dan pertumbuhan industri strategis Tiongkok, dari sejak diumumkannya strategi tersebut hingga dengan Januari 2019. Penulis menentukan tahun 2006 hingga dengan Januari 2019 sebagai *timeframe* yang akan dibahas, dan akan membahas tiga sektor Industri strategis yaitu Teknologi Informasi, Robotik, dan Bahan Baku Baru karena terdapat peran besar teknologi-teknologi revolusi industri ke-4 (*IoT, AI, dan 3d Printing*).

1.2.2. Perumusan Masalah

Penelitian ini akan menganalisis: Bagaimana Implementasi *Made in China* 2025 di Tiongkok?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat perkembangan industri Tiongkok setelah *Made in China 2025* diimplementasikan sebagai strategi Tiongkok untuk mempersiapkan industrinya menghadapi Revolusi Industri ke-4.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Melalui Penelitian ini, Penulis mengharapkan pembaca mendapatkan gambaran mengenai perkembangan industri Tiongkok dalam era revolusi industri 4.0, serta pengetahuan terhadap kebijakan “ *Made in China 2025*” Tiongkok sebagai upaya menghadapi Revolusi Industri 4.0 serta langkah Tiongkok menjadi kekuatan super manufaktur.

1.4. Kajian Literatur

Perkembangan Industri Tiongkok sudah lama mendapat perhatian dari berbagai peneliti-peneliti di dunia. Berbagai pendapat mengenai faktor pertumbuhan industri serta ekonomi Tiongkok telah ditemukan oleh para peneliti dunia, dan disetujui bahwa kebijakan serta strategi industri Tiongkok merupakan

salah satu faktor pendukung pertumbuhan industri Tiongkok pada beberapa dekade terakhir. Peneliti seperti: Joseph W. Dorn,⁴ Dic Lo,⁵ Tristan Kenderdine, ⁶dll.

Dorn, mengatakan bahwa keberhasilan pertumbuhan industri Tiongkok dikarenakan adanya pemberian subsidi secara substansial oleh Tiongkok terhadap industri Tiongkok.⁷ Dari penelitian Dorn ditemukan bahwa intervensi pemerintah terhadap kegiatan ekonomi sangatlah kuat, dan pemerintah Tiongkok memegang kendali penuh terhadap kegiatan ekonomi berserta dominasi *State Owned Enterprises (SOEs)* menguatkan posisi negara dalam kegiatan ekonomi. Dan oleh Lo, ditemukan bahwa dalam perkembangan industri Tiongkok mengalami tiga transisi yaitu padat karya, mengarah pada konsumsi untuk memperdalam modal, industrialisasi yang dipimpin investasi,⁸ Lo juga menyetujui bahwa intervensi negara dalam perkembangan industri Tiongkok memainkan peran yang penting, dan hal ini didasari dengan keberadaan kebijakan industri yang menjadi pedoman bagi seluruh industri Tiongkok. Dan oleh Kenderdine, perkembangan industri secara teknologi sudah lama menjadi tujuan utama Tiongkok dan dituangkan terhadap kebijakan nasional serta regional Tiongkok.⁹

⁴ Joseph W Dorn memiliki keahlian dalam bidang International Trade Dispute Amerika Serikat, negara asing, serta pernah dalam WTO, selain itu juga Dorn merupakan founding partner dari International Trade Practice Group.

⁵ Co-Director of the Center of Research in Comparative Political Economy, Universitas Renmin Tiongkok.

⁶ Direktur dari Future Risk, berkerja pada bidang kebijakan perdagangan, industri dan agrikultur di Tiongkok, Asia Tengah, dan Asia Tenggara.

⁷ Joseph W. Dorn & Christopher T. Cloutier, Report on Chinese Industrial Policies, King & Splading, 2013, 122.

⁸ Dic Lo dan Mei Wu, "The state and industrial policy in Chinese economic development," Transforming Economies: Making industrial policy work for growth, jobs and development ed. Salazar-Xirinachs, J. M. dkk, International Labour Office, 2014. 315.

⁹ Tristan Kenderdine, "China's Industrial Policy, Strategic Emerging Industries and Space Law," Asia & the Pacific Policy Studies, vol. 4, no. 2, 337.

Hasil penelitian diatas berupaya untuk menjelaskan hubungan antara intervensi negara terhadap pertumbuhan industri secara umum, dan kurang pada bentuk implementasi dari *Made in China 2025*, sehingga pada penelitian ini peneliti akan bentuk-bentuk implementasi *Made in China 2025* beserta implikasinya.

1.5. Kerangka Pemikiran.

Pada beberapa dekade terakhir disiplin ilmu hubungan internasional mengalami perkembangan pada disiplin ilmunya, dari membahas isu *high-politic* kini memulai mendalami kasus atau isu-isu *low-politic* seperti kebijakan ekonomi, lingkungan, *human security*, dsb.. Ekonomi Politik Internasional atau *International Political Economy* (IPE), merupakan salah satu cabang dari ilmu Hubungan Internasional yang tidak terlepas dari rana ilmu sosial, dan IPE mempelajari perilaku individu dan lingkungan sosial, politik, ekonomi yang tercipta dari individu tersebut dalam menghadapi kondisi ekonomi internasional.¹⁰

Berbagai pendekatan digunakan dalam IPE untuk memahami perilaku para aktor dalam menghadapi kondisi ekonomi internasional, seperti pendekatan Merkantilisme, Liberalisme, dan Marxisme yang menjadi dasar dari pendekatan-pendekatan dalam IPE, dan seiring dengan perkembangan pendekatan baru muncul dan mengantikannya karena tidak lagi sesuai dengan kondisi dunia, oleh karena itu pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan Neo-Merkantilisme untuk menjelaskan rumusan masalah penelitian ini. Neo-Merkantilisme, salah satu

¹⁰ Timothy C. Lim, *International Political Economy: An Introduction to Approaches Regimes and Issues*,(Washington D.C: Saylor), 2014. Bab 2.

pendekatan dalam IPE mempercayai bahwa dalam negara memegang peran yang penting untuk memastikan pelaku pasar domestik dapat bersaing dan bertahan dalam kondisi ekonomi internasional.¹¹

Dalam era kontemporer kini, dunia ekonomi internasional sedang menghadapi dengan sebuah fenomena digitalisasi massal proses industri yang dikenal dengan sebut *Industry 4.0* atau revolusi industri ke-4. Sehingga negara sebagai aktor individu menjadi fokus penelitian ini, dan penulis memilih Tiongkok sebagai subjek penelitian ini dan akan menggunakan pendekatan Neo-Merkantilisme dalam IPE untuk melihat kesiapan Tiongkok untuk menjadi sebuah Super Manufaktur melalui revolusi industri keempat, dengan menitikberatkan fokus pembahasan terhadap strategi ekonomi, kebijakan industri, sikap proteksionisme.

Neo-Merkantilisme

Neo-Merkantilisme merupakan paham ekonomi nasional yang berlandas pada paham merkantilisme klasik. Paham merkantilisme klasik mempercayai bahwa kesejahteraan suatu negara berasal dari cadangan atau penyimpanan logam mulia, selain itu juga paham merkantilisme mempercayai bahwa negara memiliki kecenderungan untuk meningkatkan cadangan logam mulia, dan kebijakan ekonomi negara cenderung mementingkan pencapaian tujuan negara. Seiring berjalannya waktu paham merkantilisme ditinggalkan dan digantikan oleh paham liberal yang mempercayai pasar terbuka tanpa intervensi negara, namun sikap intervensi negara terhadap pasar tetap ada hingga akhirnya muncul paham Neo-

¹¹ Loc. Cit.

Merkantilisme yang menjelaskan tindakan nasionalis negara pada masa pasar terbuka.

Perbedaan antara merkantilisme klasik dan Neo-merkantilisme ialah Neo-merkantilisme mempercayai keterlibatan negara dalam pasar semakin kuat tidak hanya pada pasar internasional tetapi juga pasar domestik, berbeda dengan paham merkantilisme klasik yang hanya melihat keterlibatan negara hanya pada pasar internasional. Selain itu terdapat juga pandangan berbeda mengenai perbedaan antara Neo-merkantilisme dan merkantilisme klasik. Untuk mendapatkan gambaran terhadap sudut pandang neo-merkantilisme, penulis mengambil rujukan oleh tiga penulis, antara lain Timothy C. Lim, Thomas Oatley, dan Björn Hettne.

Lim mengatakan bahwa perbedaan mendasar dari Neo-merkantilisme dan merkantilisme klasik ialah negara tidak lagi tergantung terhadap cadangan logam mulia melainkan terhadap cadangan devisa seperti mata uang asing terutama mata uang dolar Amerika,¹² dan juga negara cenderung protektif terhadap industri kecil menengah yang baru tumbuh dan sedang tumbuh atau *new emerging industries*,¹³ dan negara perlu berintervensi dan memainkan posisi *invisible hand* untuk menjamin keberlangsungan industri kecil menengah dan mengembangkan mereka sehingga dapat bersaing di pasar internasional.¹⁴

Lim juga melihat negara perlu memainkan peran *interventionist* dalam ekonomi nasionalnya,¹⁵ dan negara harus mampu mengidentifikasi serta

¹² Loc. Cit.

¹³ Loc. Cit.

¹⁴ Loc. Cit.

¹⁵ Loc. Cit.

membantu pertumbuhan industri strategis dan terpadu yang mampu menjadi industri vital dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang.¹⁶ Melalui peraturan perpajakan, subsidi, kebijakan bank, peraturan ketenagakerjaan, suku bunga, dan juga negara mengambil peran *invisible-hand* dan *interventionist* dalam pasar nasional untuk memastikan kompetisi berjalan dengan sehat.¹⁷ Peran negara sangatlah penting dalam pertumbuhan ekonomi negara, seperti yang terjadi di Jepang, Korea Selatan, Singapura, Tiongkok, dan Taiwan.¹⁸

Oleh Oatley memandang bahwa dalam melakukan perdagangan, kegiatan ekspor harus lebih diutamakan dan pemerintah sebisa mungkin harus menghambat terjadinya impor,¹⁹ namun hal ini tidaklah mudah bagi negara dengan kekuatan ekonomi lemah yang bergantung terhadap produk impor, kemampuan produksi industri domestik memegang peran penting dalam hal ini, sehingga negara harus mampu mengalokasikan sumber daya secara efektif dan untuk menciptakan serta menumbuhkan industri-industri penting seperti industri agrikultur dan komoditas primer, serta industri teknologi maju seperti komputer dan alat telekomunikasi serta mengembangkan industri tekstil yang sudah ada.²⁰ Dengan begitu negara dapat menghilangkan ketergantungannya terhadap produk impor dan sebaliknya negara dapat meningkatkan ekspor terhadap negara lain, dan negara perlu menjaga dirinya selalu dalam kondisi *positive balance of trade*,²¹ demikian menandakan negara

¹⁶ Loc. Cit.

¹⁷ Loc. Cit

¹⁸ Loc. Cit.

¹⁹ Loc. Cit.

²⁰ Loc. Cit.

²¹ Thomas, Ibid. 9

memiliki kekuatan ekonomi yang kuat.

Oatley menekankan bahwa industri manufakturlah harus menjadi prioritas utama oleh negara.²² Negara mempercayai bahwa industri tersebut mampu menghasilkan kekayaan untuk negara, serta memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri lain sehingga negara cenderung memprioritaskan industri tertentu dibandingkan dengan lainnya. Disimpulkan bahwa negara memprioritas industri yang bernilai strategi terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan intervensi negara akan lebih banyak terhadap industri yang diprioritaskan dan negara juga akan melindungi industri tersebut.

Hettne memandang bahwa Neo-merkantilisme telah melampaui ide *nation-state* yang tertuang pada merkantilisme klasik, dan Hettne mengatakan:

*“Neo-Mercantilism transcend the nation-states logic in arguing for a segmented world system, consisting of self-sufficient blocs large enough to provide “domestic” markets and make use of economies of scale and specialization in production, on the other hand, without falling prey to the anarchy of world market, and others.”*²³

Dunia mengalami regionalisasi dan negara-negara berkelompok dan membentuk blok-blok ekonomi untuk kepentingan bersama. Dan, dunia yang diregionalisasikan dipandang mampu menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil dan damai dibandingkan dengan ekonomi liberal.²⁴ Hettne menyebutkan merkantilisme klasik merupakan upaya negara untuk mencapai *stateness* atau *pursuit of stateness*,²⁵ dan hanya ini dibantahkan dalam Neo-merkantilisme yang

²² Loc. Cit.

²³ Björn Hettne, “The Concept of Neomercantilism,” *Mercantilist Economy* ed. Lars Magnusson, Springer, 1993, 252.

²⁴ Loc. Cit.

²⁵ Hettne. Ibid. 238.

mengusung regionalisasi, dan dikatakan oleh Hettne “*Regionalism is a neomercantilism regulation of emerging world market,*”²⁶ regionalisme dibutuhkan untuk menciptakan tatanan dunia yang telah terhubung satu antar lain negara-negara dunia.

Hettne melihat meningkatnya peran hubungan politik internasional dalam organisasi dan manajemen ekonomi dunia,²⁷ sebagai awalan dari Neo-merkantilisme. Dan terbentuknya regionalisme merupakan manifestasi dari neo-merkantilisme, mewarisi sifat *stateness* dari merkantilisme, dalam regionalisme juga ingin mencapai sebuah kondisi *self-sufficient*, sehingga terciptalah *self-sufficient blocs* dalam dunia politik ekonomi internasional,²⁸ sehingga terbentuk blok-blok ekonomi yang bersifat ekonomi yang bersifat *inward-looking*, dan mereka cenderung akan mengusung *free-trade* antar sesama anggota, dan blok-blok ekonomi regional semakin bertambah jumlahnya seperti Uni Eropa, *North America Free Trade Agreement*, *ASEAN Economic Community*, *Trans Pacific Partnership*, *Asia Pacific Economic Cooperation*, dll. Munculnya blok-blok ekonomi berlandaskan pada keinginan untuk melakukan perdagangan bebas namun hanya sebatas regional.

Berdasarkan ketiga pandangan mengenai Neo-merkantilisme, penulis menyimpulkan bahwa Neo-merkantilisme merupakan upaya negara untuk mencapai *stateness* dan *self-sufficient* dalam dunia yang saling terhubung, dengan memainkan peran sebagai *invisible hand* dan mengendalikan pasar, negara

²⁶ Ibid. 251.

²⁷ Ibid. 240.

²⁸ Ibid. 249.

memastikan industri-industri strategisnya mendapatkan akses terhadap sumber-sumber daya yang diperlukannya untuk tumbuh dan berkembang hingga mampu bersaing dalam pasar internasional.

Tidak hanya itu, terdapat pendekatan-pendekatan lain yang penting bagi penulis untuk memahami neo-merkantilisme, seperti strategi ekonomi, kebijakan industri, dan proteksionisme.

Economic Strategy

Strategi ekonomi tidak dapat mengacuh pada satu teori ataupun model pertumbuhan ekonomi baik itu secara langsung maupun tidak. Seperti yang dikatakan Scott

“In these circumstances a mix of ideology and theory can be said to drive economic strategy, and competing versions or interpretations of theory are often to be found behind competing economic strategies,”²⁹

Dalam menghadapi kondisi ekonomi internasional, negara tidak boleh mengadopsi satu sejenis teori ataupun model pertumbuhan, sejatinya strategi ekonomi negara harus bersifat fleksibel.

Menghadapi kondisi pasar besar, sebuah negara harus bersikap fleksibel. Dari pandangan Keynesian dikatakan bahwa negara memiliki memiliki empat alternatif dalam mengendalikan arus sumber daya:³⁰

“(1) promote domestic sources of supply while restricting imports;(2) promote exports to

²⁹ Ibid. 244

³⁰ Bruce R. Scott, "The Concept of National Economic Strategy," *International Friction and Cooperation in High-Technology Development and Trade: Papers and Proceedings*, ed. Charles W. Wesnner, (Washington, DC: The National Academies Press, 1997), 243

match the rising imports;(3) keep hands off and, if necessary, accept a lower rate of growth; and (4) finance a trade gap temporarily through capital imports, whether debt or equity”

Negara harus mampu menyesuaikan kebijakannya dengan perubahan yang terjadi, oleh Bank Dunia negara di dunia dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk yaitu *inward looking* atau *outward looking*, negara *inward looking* memiliki kecenderungan untuk berpusat pada produksi pasar dalam negeri dan menerapkan kebijakan *import substitution*, sedangkan negara *outward looking* memiliki kecenderungan untuk memperkecil hambatan perdagangan yang dijalaninya. Untuk negeri Industri sendiri memiliki kecenderungan untuk bersikap netral atau ditengah-tengah *inward looking* dan *outward looking*.

Namun, untuk bersikap netral bukanlah hal yang mudah, sebuah Strategi ekonomi terbentuk oleh ide, dan ide sejatinya mempunyai potensi yang sangat besar untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, namun untuk ide-ide yang bernilai secara ekonomis biasanya dikuasai oleh orang-orang yang lebih mengutamakan keuntungan untuk dirinya. Dan menjadi sebuah tantangan untuk mengimplementasikan sebuah strategi ekonomi yang efektif, karena individu atau lembaga yang terlibat memiliki kecenderungan untuk membagikan ide-ide mereka jika terdapat keuntungan. Seperti yang dikatakan oleh Romer:

“Most ideas with economic value are not controlled by a charitable organization willing to bear the costs of dissemination. Instead, they are controlled by people who will not incur the costs needed to share what they know unless they have a monetary incentive to do so.”³¹

Oleh karena itu, suatu ide yang bagus harus didukung oleh suatu institusi

³¹ Paul M. Romer, “Two Strategies for Economic Development: Using Ideas and Producing Ideas,” *Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics* 1992, hal. 65.

ataupun badan pemerintah yang baik, sehingga ide-ide cemerlang digunakan semestinya untuk kebaikan bersama.

Kebijakan Industrialisasi

Pada karya Bob Sugeng “Politik Bisnis Internasional” dikatakan terdapat lima faktor internal yang mendorong kelompok negara NICs untuk melakukan ekspansi ekonomi, antara lain; (1) Tingkat Pendidikan masyarakat yang memadai sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan kebutuhan industrialisasi, (2) berfungsinya peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga ekonomi secara optimal sehingga iklim investasi yang kondusif dapat terpelihara dengan baik, (3) kemampuan lembaga-lembaga pemerintah untuk membuat kebijakan ekonomi yang koheren dan komprehensif sehingga pelaku bisnis mempunyai kepercayaan diri tinggi untuk menanamkan modal ke negara berkembang, (4) kemampuan pemerintah untuk melakukan intervensi positif di sektor perbankan, perpajakan, investasi domestik/asing, pengontrolan harga, pengontrolan upah buruh, dan lain-lain, dalam rangka peningkatan efisiensi; dan (5) pendapatan ekonomi rakyat yang memadai sehingga dengan ting kemampuan menabung (*saving rates*) yang tinggi investasi dapat terus dikembangkan.³²

Keberhasilan negara NICs dalam melakukan ekspansi ekonomi atau strategi industrialisasinya bergantung pada kebijakan industrinya. Chalmers Johnson mendefinisikan “kebijakan industri” sebagai seperangkat kebijakan ekonomi yang khusus diarahkan pada hal-hal seperti: proteksi industri di dalam negeri, pengembangan industri-industri strategis (besi, baja, petrokimia, semen, dll.)

³² Bob, Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal. 81-82.

dan perubahan struktur perekonomian nasional untuk mengantisipasi tekanan-tekanan internal maupun eksternal.

Secara umum strategi industrialisasi terbagi menjadi dua, yaitu strategi Industrialisasi Substitusi Impor (ISI) dan strategi Industrialisasi ber-Orientasi Ekspor (IOE).

“ISI adalah usaha suatu negara untuk melakukan substitusi barang-barang impor dengan barang-barang sejenis yang diproduksi oleh industri domestik, sedangkan IOE adalah upaya suatu negara untuk memproduksi barang-barang industri bagi kepentingan pemenuhan permintaan pasar dunia.”³³

Strategi IOE banyak digunakan oleh negara NICs pada kawasan Asia Timur untuk memacu pertumbuhan ekonomi mereka, seperti Taiwan, Hongkong, dan Singapura.

Proteksionisme

Proteksionisme merupakan tindakan atau upaya suatu negara yang membatasi perdagangan barang dan jasa dari luar, tindakan ini ditujukan untuk menjaga kesehatan pasar domestik yang terkena dampak persaingan pasar internasional, dan dilakukan dengan cara menetapkan tarif terhadap produk ataupun dengan regulasi-regulasi yang menghambat produk luar untuk masuk ke dalam pasar domestik ataupun sebaliknya. Tarif yang dikenakan pada produk dapat berupa tarif impor dan tarif ekspor, dan penggunaan tarif lebih sering digunakan oleh negara kurang berkembang, seperti yang dikatakan oleh David Greenaway

“... export tariffs tend principally to be levied for revenue purposes rather than protective

³³ Ibid. 83.

purposes. As such their use is more common in less developed countries (LDCs) than developed market economies (DMEs).”³⁴

Kebijakan tarif ekspor ditujukan untuk mendapatkan keuntungan pemasukan, dan Greenaway juga mengatakan negara kurang berkembang juga bergantung kepada keuntungan pemasukan dari tarif impor, walaupun secara teoritis tarif impor ditujukan untuk melindungi pasar domestik atau bersifat protektif.³⁵

Sebuah negara memutuskan untuk kenakan tarif disebabkan terjadinya distorsi pasar, sehingga negara perlu mengoreksi distorsi tersebut. Distorsi pasar yang dapat terjadi antara lain; 1. distorsi produk pasar domestik, 2. Distorsi pasar faktor domestik, 3. Distribusi pendapatan, dan 4. Distorsi pasar asing.³⁶ Dan tarif menjadi salah satu instrumen negara untuk mengoreksi distorsi yang terjadi, dan merupakan kebiasaan negara untuk mengenakan tarif terhadap produk asing dan menghadapi persaingan internasional.

Kebiasaan ini mulai ditinggalkan oleh berbagai negara terutama negara barat setelah Perang Dunia II. Hal ini dikarenakan dampak dari Perang Dunia II sangatlah masif dan negara pemenang perang merasa sulit untuk bangkit kembali apabila bekerja sendiri, muncullah ide untuk melaksanakan perdagangan bebas tarif. Kemudian dibentuklah perjanjian GATT (*General Agreement on Tariffs and Trades*) dan berlanjut membentuk WTO (*World Trade Organization*). Tetapi sikap proteksionis negara tetap berlanjut dan mulai menerapkan *non-tariffs barriers* atau

³⁴ David Greenaway, *International Trade Policy: From Tariffs to the New Protectionism*, (New York: St. Martin Press), 1983, 45.

³⁵ Loc. Cit.

³⁶ Ibid. 53.

hambatan non-tarif yang bersifat non-transparan dan sulit di determinasi yang dikenal sebagai Neo-Proteksionis.³⁷

Greenaway mengatakan:

“The instruments of the new protectionism are many and varied: they embrace voluntary export restraints, quotas, administrative guidance and surveillance, discriminatory customs valuation procedures and many more besides.”³⁸

Berbeda dengan tindakan proteksionis yang menekan beban/tarif terhadap produk, tindakan neo-proteksionis yang memberikan bantuan/subsidi terhadap produksi domestik, dan memberikan hambatan non-tarif terhadap produk luar.

Hambatan non-tarif kini menjadi kunci kebijakan negara yang dipercayakan perlu untuk mencapai tujuan-tujuan domestik tertentu.³⁹ Pelaksanaan perdagangan bebas hanya sebatas sebuah perjanjian yang tidak memiliki kekuatan mengikat, bahkan pada masa kini pun, perang dagang yang disebabkan oleh hambatan tarif maupun hambatan non-tarif terus terjadi. Negara industri maju pun kerap memberikan hambatan terhadap impor mobil, baja, tekstil, alat elektronik, dan produk agrikultur.⁴⁰

Dalam penerapan perdagangan strategis dan kebijakan industri, Jepang merupakan contoh terbaik. Jepang menerapkan kebijakan proteksionis kepada industri domestik menghadapi persaingan internasional melalui berbagai kebijakan subsidi langsung maupun tidak langsung, dan saat industri domestik telah tumbuh

³⁷ Robert C. Hine, dkk., *Global Protectionism ed. David Greenaway*, St. Martin Press, 1991, 7.

³⁸ Loc. Cit.

³⁹ Dominic Salvatore, *Protectionism and World Welfare*, Press Syndicate of the University of Cambridge, 1993, 4.

⁴⁰ Loc. Cit.

kuat dan mampu menandingi negara lain, Jepang melakukan *dumping* ke pasar internasional, serta mengusung kebijakan perdagangan bebas dan mengancam sikap proteksionis dan menjadikan dirinya sebagai contoh keberhasilan menerapkan perdagangan bebas yang non-proteksionis.⁴¹

Salvatore pada tulisannya waktu mengatakan:

*“US support for a liberal multilateral trading system has wavered during the past two decades as a result of its loss of hegemonic power. This also moved the United States more and more toward regionalism, as the recent pursuit of a North American Free Trade Association indicates.”*⁴²

Dihitung dari tulisan Salvatore diterbitkan maka sikap Amerika Serikat tidak hanya berlangsung selama 2 dekade tetapi sudah 3 dekade, dan pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, sikap proteksionis AS juga terlihat dan AS mulai melirik hubungan bilateral dalam perdagangan bebas dan dalam hubungan multilateralnya cenderung bersifat proteksionis.

Sikap atau tindakan proteksionis merupakan langkah suatu negara untuk menguatkan industri domestik sehingga mampu bersaing dengan industri asing, dengan begitu langkah selanjutnya suatu negara untuk menjadi negara industri maju akan semakin mudah, apabila industri domestik telah kuat, pasar domestik telah dikuasai, dan hanya menunggu waktu untuk menguasai pasar internasional.

Revolusi Industri

Revolusi Industri terkait secara langsung terhadap produktivitas ekonomi

⁴¹ Loc. Cit.

⁴² Ibid. 8.

suatu negara.⁴³ Pada awal Revolusi Industri telah mengubah tingkat produktivitas ekonomi secara luas, dan beberapa negara mengalami pertumbuhan produktivitas secara pesat. Selain itu, ekonomi modern juga mengalami pertumbuhan efisiensi secara kuat pada masa awal Revolusi Industri.

Elemen penting pada masa Revolusi Industri ialah investasi tradisional pada modal fisik tidak penting lagi terhadap pertumbuhan kinerja pekerja lagi.

Sistem politik juga harus berubah untuk mendukung proses Industrialisasi sendiri, dan dengan terjadi perubahan terhadap rezim politik berkemungkinan untuk memicu efisiensi produksi pada revolusi industri. Salah satu contohnya yaitu kejadian *Glorious Revolution* yang terjadi di Inggris, dan perubahan politik pada Inggris ini berhasil membuat Inggris menikmati hasil terbaik dari Revolusi Industri.

Keberhasilan Industrialisasi juga akan mendorong tingkat perdagangan;

“Ricardo’s great achievement in his Principle of Political Economy and Taxation was to demonstrate that trade could raise the general level of welfare even under circumstances which appear to make this outcome highly unlike.”⁴⁴

Ricardo berhasil membuktikan bahwa perdagangan mampu menaikkan tingkat kesejahteraan walaupun dalam kondisi yang terlihat tidak memungkinkan pun. Tingkat perdagangan dipengaruhi oleh tingkat produktivitas industri domestik, sehingga untuk meningkatkan perdagangan setidaknya produktivitas harus meningkat terlebih dahulu.

⁴³ Gregory Clark, “The Industrial Revolution,” *Handbook of Economic Growth*, 1st, Vol. 2, ed. Philippe Aghion Steven Durlauf (North Holland: Elsevier 2005), 1.

⁴⁴ Chris Brown, *International Relation and Industrial Society* (London: LSE Research Online, 2002). hal 3

Dan pada masa globalisasi, para kapitalis tidak berkompetisi antara sesama dalam ekonomi nasional, namun lebih didominasi oleh kecenderungan untuk membentuk blok bersama investor asing.⁴⁵ Dan membentuk masyarakat industri yang baru, namun perlu diingat masyarakat industri tidak akan pernah terpisah dari bentuk pra-industri yang melekat padanya.⁴⁶

Hingga saat ini proses revolusi industri telah memasuki empat era yang berbeda, antara lain; Revolusi Industri Pertama (1760 s.d. 1840) yang ditandai dengan munculnya mesin uap dan memulai proses produksi secara mekanik, Revolusi Industri Kedua (1870 s.d. 1914) yang ditandai dengan hadirnya tenaga listrik sehingga memungkinkan proses produksi massal, Revolusi Industri Ketiga (1960 s.d. akhir pertengahan abad ke-20) yang ditandai dengan kemunculan komputer, internet, serta sumber energi baru seperti tenaga nuklir, pada era ini tenaga kerja manusia mulai digantikan oleh robot-robot industri dan proses otomatisasi industri, dan pada kontemporer kini kita sedang memasuki era Revolusi Industri Keempat yang dikenal juga sebagai Revolusi Industri 4.0, dan pada era ini proses digitalisasi menjadi salah satu titik permulaannya dan proses ini mengakibatkan terjadi yang proses perpaduan antara dunia nyata dengan dunia digital dan membentuk sebuah *Cyber-physical system*.⁴⁷

⁴⁵ Ibid. 16.

⁴⁶ Ibid. 19.

⁴⁷ Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*, (Crown Business, New York, 2017), 7.

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Untuk menjawab masalah penelitian “ Bagaimana implementasi Made in China 2025 di Tiongkok?” metode penelitian yang akan dipergunakan adalah metode penelitian kualitatif sehingga Analisa terhadap kekuatan pendorong Tiongkok untuk memunculkan kebijakan “*Made in China 2025*” dapat muncul ke permukaan melalui penelitian ini, dengan melalui kegiatan pengumpulan data, analisa, penulisan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang sedang ditelaah peneliti,⁴⁸ Maka penelitian ini akan mengumpulkan data, analisa, dan penulisan sesuai dengan disiplin Ilmu Hubungan Internasional untuk meneliti dan mendalami implementasi strategi Tiongkok dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan studi dokumen untuk mendapatkan data-data terkait dengan penelitian, sumber data yang dikumpulkan oleh penulis berupa data primer dan juga data sekunder, antara lain; dokumen resmi pemerintah, literatur, berita, serta pernyataan resmi Lembaga terkait di media massa.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini akan dituliskan dalam lima bagian atau bab, pada

⁴⁸ John, W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* 4th Ed.(London: Sage Publication, 2014).

bab pertama akan membahas tentang latar belakang masalah, teori-teori terkait, bab dua akan membahas mengenai perkembangan kebijakan industri Tiongkok dan karakteristik kebijakan industri Tiongkok, bab tiga akan membahas mengenai dampak revolusi industri ke-4 dan strategi Tiongkok untuk menghadapi melalui *Made in China 2025*, bab empat akan membahas mengenai dampak strategi *Made in China 2025* terhadap perkembangan dan pertumbuhan industri Tiongkok, dan bab lima akan berupa kesimpulan penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian.